

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Kawasan negara Republik Indonesia menunjukkan keanekaragaman kondisi geografis dan corak kehidupan serta sifat masyarakat yang multi etnis. Corak dan sifat masyarakat yang majemuk merefleksikan ragam budaya yang tersebar di seluruh Indonesia. Suyatno Kartodirjo (dalam Warsito, 2012: 94) pada makalahnya yang berjudul *“Revitalisasi Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa dalam Rangka Menuju Indonesia Baru”* mengemukakan bahwa aneka budaya dan komunitas di Indonesia seperti ditunjukkan hasil studi Geertz (1981), antara lain disebutkan bahwa di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnis (suku bangsa) yang berbeda-beda dengan identitas kebudayaan tersendiri, dan lebih dari 2000 bahasa khas. Kepercayaan keagamaan juga bermacam-macam. Hampir semua agama yang besar dan penting di dunia ada di kepulauan Indonesia. Hal ini relevan dengan pernyataan yang disampaikan oleh *National Family Planning Coordinating Board* seperti dibawah ini (dalam Warsito, 2012: 95):

“The whole of Indonesia consist of thousand of islands scattered over a vast territory and includes different cultural forms. There exist not less than 250 languages and dialect, different customary laws among the adat-circles, and different family system, including both matrilineal and patrilineal system. The various forms of culture are coloured by the influence of foreign cultures that have entered Indonesia.”

Artinya bahwa Indonesia terdiri dari beribu pulau yang tersebar di daerah-daerah yang berbeda. Di Indonesia mempunyai Bahasa kurang lebih 250 bahasa dan dialek, hukum adat yang berbeda diantara lingkaran adat dan sistem keluarga yang berbeda-beda yang terdiri dari sistem matrilineal dan patrilineal. Bentuk budaya yang bermacam-macam diwarnai dengan pengaruh budaya asing yang memasuki Indonesia.

Salah satu pulau di Indonesia yang kaya akan budaya dan keanekaragamannya yaitu Pulau Bali. Pulau Bali tersohor di seantero dunia karena keindahan pemandangannya dan kekayaan tradisi kesenian serta religinya. Salah satu kabupaten di Bali yang memiliki luas wilayah terbesar yaitu Kabupaten Buleleng dengan luas 1.365,88 km² (24,23%) membentang di wilayah utara pulau Bali. Berdasarkan data tersebut Kabupaten Buleleng memiliki keragaman objek wisata, mulai dari hutan alam yang tersebar dari taman nasional Bali Barat sampai mendekati kota Singaraja. Begitu pula keindahan danau Buyan dan danau Tamblingan, keheningan air terjun Gitgit, mata air panas Banjar serta pemandangan pantai Lovina dengan atraksi ikan lumba-lumba. Saat ini juga dikembangkan beberapa objek wisata baru yaitu wisata spiritual dan wisata sejarah. Salah satu objek wisata spiritual dan sejarah yaitu Pura Beji Sangsit.

Berdasarkan potensi wisata dan keunikan Kabupaten Buleleng serta keterbatasan jarak dan waktu peneliti yang berdomisili di kota Singaraja maka peneliti melakukan penelitian di kabupaten Buleleng. Kabupaten Buleleng terbagi menjadi 9 kecamatan dan 148 desa/kelurahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Kecamatan, Desa, dan Dusun Kabupaten Buleleng

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun
1	Kecamatan Gerokgak	14 desa	73 dusun
2	Kecamatan Seririt	21 desa	95 dusun
3	Kecamatan Busungbiu	15 desa	42 dusun
4	Kecamatan Banjar	17 desa	60 dusun
5	Kecamatan Sukasada	15 desa	65 dusun
6	Kecamatan Buleleng	29 desa	93 dusun
7	Kecamatan Sawan	14 desa	69 dusun
8	Kecamatan Kubutambahan	13 desa	46 dusun
9	Kecamatan Tejakula	10 desa	59 dusun

Sumber Data: Profil Kesehatan Kabupaten Buleleng Tahun 2016

Jumlah penduduk Kabupaten Buleleng pada tahun 2016 adalah 650.100 jiwa, dimana sebaran penduduk tertinggi berada di Kecamatan Buleleng. Kabupaten Buleleng merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Bali yang memiliki seni dan budaya yang istimewa. Sama dengan Kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali, masyarakat Buleleng masih memiliki adat dan budaya yang kental baik dalam hal upacara keagamaan, kesehatan, perdagangan maupun hal lainnya. Letak kekuatan Bali adalah pada komposisi kekuatan alam dan kebudayaannya. Adapun kekuatan kebudayaan Bali dalam bidang agama salah satunya adalah keberadaan pura. Pura adalah istilah untuk tempat ibadah Agama Hindu di Indonesia, khususnya di Bali. Oleh karena itu menurut Wiana (dalam Yuliasih, 2014) muncullah sebutan untuk Bali sebagai Pulau Seribu Pura.

Buleleng bagian dari Pulau Bali banyak terdapat pura yang tersebar di berbagai kecamatan, termasuk Kecamatan Sawan terdapat beberapa Pura Kahyangan Tiga, seperti Pura Beji yang terletak di Desa Sangsit, Kecamatan Sawan. Pura ini merupakan Kahyangan Tiga sebagai tempat pemujaan umat Hindu untuk memuja Hyang Widhi yang berstana disana sebagai Dewa Kesuburan yang

biasa diistilahkan dengan Pura Subak. Menurut Yuliasih (2014) Pura ini memiliki keunikan yaitu hampir semua bagian dari pura ini dihiasi oleh ukiran *style* Buleleng berbentuk tumbuh-tumbuhan merambat dan motif bunga ciri khas Bali Utara.

Pura Beji ini merupakan pura subak yang ada di kecamatan Sawan. Menurut Sirtha (2016: 18) Pura Subak adalah sebuah tempat, di mana petani mencari harmoni antara mereka dengan Tuhan Yang Maha Esa. Peran Pura Subak dapat dilihat dari fungsi pelinggih yang terdapat di halaman dalam pura. Semua pelinggih tersebut ditunjukkan kepada Dewa atau *Ida Bhatara* yang berhubungan dengan kesuburan dan kemakmuran. Ragam hias yang banyak dijumpai di Pura Beji Sangsit adalah ragam hias ornamental dan ragam hias berupa relief.

Selain itu berdasarkan fenomena-fenomena di media sosial salah satunya Instagram terlihat banyak pengguna yang melakukan *tag location* di pura Beji Sangsit. Hal tersebut membuktikan bahwa Pura Beji Sangsit banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik wisatawan domestik maupun mancanegara untuk melakukan *tour*, wisata spiritual, dan melaksanakan foto *pre-wedding*. Sehingga dari fenomena tersebut pura Beji Sangsit mampu menjadi ikon pariwisata dan spiritual yang unik dari kabupaten Buleleng.

Fenomena-fenomena tersebut muncul karena keunikan yang terdapat di pura Beji Sangsit yaitu dilihat dari bahan-bahan bangunan terbuat dari batu paras asli yang hanya ada di Desa Sangsit. Sesuai dari hasil wawancara dengan kelian pura Beji Sangsit menuturkan bahwa pura Beji Sangsit untuk candi-candi yang ada pada zaman dahulu dibuat dari bahan alam yaitu paras asli desa Sangsit yang ada di daerah abasan desa Sangsit dan untuk ukir-ukiran serta relief di pura Beji Sangsit

ini satu-satunya pura subak di Bali yang menyerupai bentuk relief candi Prambanan.

Berdasarkan hasil penuturan tersebut pura Beji Sangsit merupakan pura yang memiliki fungsi lebih daripada pura Beji lainnya yang ada di Bali, yaitu menjadi objek wisata dan melaksanakan *prewedding*. Dari hal tersebut Pura Beji Sangsit memiliki *pengempon* pura yang bertanggungjawab untuk mengelola Pura Beji Sangsit. Menurut Bastian (dalam Mahendra, 2017) mengingat tentang tradisi atau kebudayaan yang ada di Bali, dimana setiap pura memiliki organisasi di dalamnya yang disebut dengan organisasi keagamaan. Organisasi keagamaan dapat mengacu pada organisasi dalam sebuah Pura, Masjid, Gereja, Kapel, Klenteng, maupun Wihara. Organisasi keagamaan dapat diartikan sebagai organisasi yang fokus gerakannya terkait agamanya tertentu, yang menyangkut juga permasalahan ibadah atau menjalankan segala kewajiban Tuhan terkait agama dan kepercayaan. Organisasi keagamaan sangat berperan penting dalam kelancaran kegiatan yang berhubungan dengan pura.

Organisasi keagamaan di pura merupakan organisasi nirlaba. Menurut Agustana (2017) organisasi nirlaba atau organisasi *non-profit* adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.

Pada pelaksanaan tata kelola organisasi yang bertujuan *non-profit*, transparansi dan akuntabilitas sangat ditekankan pada tata kelola yang berfokus pada tertib administrasi. Menurut Paranoan (2018:162) fenomena mengenai pentingnya pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi, transparansi dan rasa keadilan di dalam setiap organisasi harus dicermati oleh setiap organisasi agar, organisasi tersebut memperoleh kepercayaan dari para *stakeholder*. *Good governance* sendiri sebagai bagian dari akuntabilitas merupakan pilar bagi setiap organisasi untuk bisa berkembang dan bertahan. Akuntabilitas bagi setiap organisasi, baik organisasi profit maupun organisasi *non-profit* termasuk organisasi keagamaan sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, setiap organisasi mempunyai keterkaitan dengan pihak internal dan eksternal organisasi.

Transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Jamal Ma'mur Asmani (dalam Anggraini, 2013) bahwa transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik adalah terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan secara memadai dan mudah dimengerti. Jadi transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

Menurut Prof. Miriam Budiardjo (dalam Viktoria, 2014) bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban pihak yang diberi mandat untuk memerintah kepada mereka yang memberi mandat itu. Menurut Syahrudin (dalam Gunawan,

2016:92) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi. Sehingga akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pihak yang diberi mandat untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang sudah dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi maupun sekelompok orang dalam suatu organisasi.

Transparansi dan akuntabilitas dapat diwujudkan dengan adanya laporan keuangan. Hal ini didukung oleh pernyataan Sadeli (2014: 18-19) laporan keuangan merupakan wujud dari akuntabilitas suatu organisasi. Laporan keuangan merupakan produk akhir dari proses atau kegiatan akuntansi suatu kesatuan usaha. Laporan itu diperlukan oleh pihak yang berkepentingan antara lain: manajemen perusahaan, pemilik perusahaan, banker, kreditor, investor, pemerintah, dan lembaga lain. Mengingat masing-masing pihak yang berhubungan dengan perusahaan bersangkutan mengenai kepentingan yang berbeda-beda maka laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga memenuhi kebutuhan semua pihak. Menurut Kurniasari (2011:144) laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang terhindar dari salah saji material, mudah dimengerti, dan tentunya harus sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

Menurut PSAK No. 45 (dalam Haryono, 2019:982-983), laporan keuangan organisasi nonlaba terdiri dari empat unsur yaitu, laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas, laporan arus kas untuk satu periode laporan, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan posisi keuangan menyajikan pada akhir periode laporan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu terikat secara

permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat. Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer dan tidak terikat dalam suatu periode. Tujuan umum laporan arus kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Laporan ini digunakan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menggunakan arus tersebut. Penilaian atas kemampuan menghasilkan kas dikaitkan dengan aktivitas yang dijalankan perusahaan, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Pura Beji Sangsit sebagai pura Subak yang ada di kecamatan Sawan, dilihat dari hasil pendapatan periode bulan Januari hingga Desember tahun 2018 (tabel 1.2) memiliki pendapatan yang cukup tinggi di bidang pariwisata. Menurut Sirtha (2016: 10) memaparkan bahwa ada beberapa subak terutama di perkotaan yang sudah mati, karena areal sawahnya telah habis menjadi bangunan. Ada beberapa areal persawahan, tetapi pemiliknya sudah beralih, sehingga tidak ada krama subaknya. Yang masih ada hanyalah pura subak, namun digunakan sebagai tempat bersembahyang bagi penduduk disekitar pura tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai yang tampak pada perubahan fungsi pura subak.

Tabel 1.2.
Laporan Keuangan dari Objek Pariwisata
Pura Beji Sangsit Tahun 2018

(dalam Rupiah)

No.	Tanggal	Debet	Kredit	Jumlah
1	31-1-2018	6.660.000	6.050.000	610.000
2	28-2-2018	10.342.000	6.075.000	4.267.000
3	31-3-2018	13.609.000	13.500.000	109.000
4	30-4-2018	15.553.000	11.162.000	4.371.000
5	31-5-2018	20.282.000	6.203.000	14.079.000
6	30-6-2018	20.355.000	6.000.000	14.355.000
7	31-7-2018	32.229.000	6.000.000	26.229.000

8	31-8-2018	33.715.000	6.000.000	27.715.000
9	30-9-2018	29.495.000	6.000.000	23.495.000
10	31-10-2018	19.598.000	6.000.000	13.583.000
11	30-11-2018	11.730.000	6.000.000	5.730.000
12	31-12-2018	5.520.000	6.000.000	(480.000)

(Sumber: Bendahara pura Beji Sangsit, 2018)

Berdasarkan rincian laporan keuangan diatas, pura Beji Sangsit sebagai pura subak mampu menjadi ikon pariwisata dan menambah pendapatan pura tersebut. Selain itu Pura Beji Sangsit masih menjadi tempat bersembahyang jika ada piodalan. Sehingga dalam pelaksanaan praktik pengelolaan keuangan, transparansi dan akuntabilitas di pura Beji Sangsit merupakan suatu hal menarik yang bisa dikaji lebih mendalam karena dalam pengelolaan keuangan di Pura Beji Sangsit dikelola oleh pihak pengempon Pura itu sendiri, yang dimana dalam peraturan pemerintah UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu pemerintah desa diharapkan untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam desa maupun dalam pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan Zainudin (2018:17) yang memaparkan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan Desa Gamtala sebagai desa wisata yaitu kredibilitas dan wibawa individu maupun entitas Desa Gamtala menjadi pertimbangan utama mengapa akuntansi melalui pelaporan keuangan yang dibuat oleh pengurus Desa Gamtala menjadi poin penting dalam pengelolaan keuangan Desa Gamtala. Hal sejalan juga disampaikan oleh Ningrum (2016:7) bahwa penerapan prinsip *good governance* dengan menerapkan beberapa komponen, seperti transparansi yang merupakan salah satu poin penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, terutama dalam pengelolaan desa wisata

kota Pekanbaru. Prinsip penting selanjutnya yang digunakan yaitu akuntabilitas merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan. Semua itu harus dipertanggungjawabkan oleh pemerintah, baik keberhasilannya atau juga kegagalannya yang di ukur berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pemaparan mengenai pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pariwisata dapat disimpulkan bahwa apabila dalam pengelolaan keuangan objek pariwisata memerlukan penerapan prinsip *good governance*. Tujuan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan kepariwisataan yaitu agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pengurus organisasi dalam pengelolaan keuangan. Jadi untuk mempertahankan kredibilitas suatu entitas organisasi, maka akan lebih baik jika dalam pengelolaan keuangannya menerapkan prinsip *good governance*.

Oleh karena itu pengempon pura Beji Sangsit harus memiliki prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena didalam pengelolaan keuangannya pihak *pengempon* pura diberikan amanah dalam mengelola keuangan. Hal ini harus dipatuhi dan dilaksanakan karena *pengempon* pura bertanggungjawab dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran di pura Beji Sangsit sebagai objek pariwisata, karena didalam pemasukan dan pengeluarannya tidak ada angka yang pasti. Angka-angka yang tidak pasti seperti *dana punia* yang bersumber dari pemasukan pariwisata banyak wisatawan yang memberikan *dana punia* dengan ikhlas. Sehingga tidak tentu omset pariwisata yang diterima setiap harinya begitu pula dengan pengeluaran yang terpakai, jumlahnya tidak menentu saat ada piodalan, pembangunan pura, perawatan pura, dan apabila terjadi bencana alam

yang merusak pura. Sehingga dari beberapa jenis pemasukan dan pengeluaran *pengempon* pura harus bertanggung jawab atas keuangan yang dikelola dan bersikap terbuka kepada anggota, *pengempon* pura Beji Sangsit dan seluruh masyarakat desa Sangsit

Penelitian ini melanjutkan penelitian yang dilakukan oleh Zainuddin dan Resmiyati Ansar. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti oleh Zainuddin dan Resmiyanti Ansar pada tahun 2018, adalah sama-sama meneliti prinsip akuntabilitas. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini dilakukan pada tahun 2019, dengan objek penelitian di Pura yang merupakan organisasi nirlaba sedangkan penelitian yang dilakukan Zainuddin dan Resmiyanti Ansar mengambil objek di desa wisata Gamtala. Penelitian ini juga menambahkan prinsip transparansi untuk melihat praktek pengelolaan keuangan.

Pernyataan yang ditemukan peneliti pada saat observasi awal di pura Beji Sangsit terkait dengan transparansi dan akuntabilitas sesuai dengan hasil observasi dan wawancara dengan *kelian* atau ketua pura Beji Sangsit yang menyatakan bahwa dalam kesepakatan awal saat terbentuk *pengempon* pura Beji Sangsit telah disepakati dalam waktu satu bulan sekali yaitu tepatnya setiap *rahina buda manis* akan dilaksanakan *paruman* atau rapat dengan masyarakat pura Beji Sangsit yang akan membahas mengenai keuangan setiap bulan mulai dari pemasukan dan pengeluarannya. Selain itu dalam *paruman buda manis* akan dipertanggungjawabkan kas pariwisata setiap bulan dan kas *piodalan* atau hari raya setiap ada hari raya, dimana *pengempon* pura Beji Sangsit akan membuat rancangan anggaran biaya (RAB) dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang akan di *print-out* kemudian diberikan kepada seluruh masyarakat subak Beji Sangsit.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan anggota masyarakat atas nama bapak Made Yasa dan bapak Made Sulandep kemudian disesuaikan dengan pernyataan yang disampaikan *kelian* pura Beji Sangsit ditemukan bahwa 1) benar adanya setiap satu bulan sekali dilaksanakan *paruman* untuk membahas keuangan yang terjadi setiap satu bulan dan dilaksanakan saat *rahina buda manis*, 2) ketika pelaksanaan *paruman buda manis* setiap satu bulan sekali *pengempon* pura Beji Sangsit untuk pelaporan keuangan kas pariwisata tidak dicetak bukti fisik berupa *print-out* hasil rincian kas pariwisata namun hanya dibacakan oleh *pengempon* pura Beji Sangsit, dan *pengempon* pura Beji Sangsit hanya mencetak rincian laporan keuangan saat ada *piodalan ageng* atau hari raya besar pura Beji Sangsit, 3) laporan keuangan yang dibuat oleh *pengempon* pura Beji Sangsit masih sederhana dan belum sesuai dengan laporan keuangan di PSAK no.45 dimana pura sebagai organisasi nirlaba sudah memiliki standar laporan keuangan yang bisa dijadikan pedoman oleh seluruh organisasi nirlaba yang ada di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pura Beji Sangsit sebagai Objek Pariwisata di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.”**

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut.

1.2.1 Kesepakatan awal yang dibuat oleh *pengempon* pura Beji Sangsit dalam melaksanakan pengelolaan keuangan terdapat ketidaksesuaian hasil observasi dan wawancara dengan anggota masyarakat.

1.2.2 Pencatatan laporan keuangan di pura Beji Sangsit masih sederhana dan belum menggunakan standar laporan keuangan di PSAK no. 45.

1.3 PEMBATASAN MASALAH

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi di Pura Beji Sangsit, maka peneliti memfokuskan penelitian pada analisis transparansi dan akuntabilitas terkait pengelolaan keuangan di Pura Beji Sangsit sebagai objek pariwisata di Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng.

1.4 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari latar belakang tersebut, maka beberapa permasalahan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini, adalah:

1.4.1 Dari mana saja pura Beji Sangsit memperoleh pemasukan?

1.4.2 Bagaimana pengalokasian dana di pura Beji Sangsit?

1.4.3 Apakah pengelolaan keuangan pura Beji Sangsit sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang pelaporan organisasi nirlaba?

1.4.4 Bagaimana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pura Beji Sangsit sebagai objek pariwisata?

1.4.5 Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh *pengempon* pura Beji Sangsit dalam Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Pura Beji Sangsit?

1.5 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

- 1.5.1 Untuk mengetahui dari mana saja Pura Beji Sangsit memperoleh pemasukan.
- 1.5.2 Untuk mengetahui pengalokasian dana di Pura Beji Sangsit.
- 1.5.3 Untuk mengetahui pengelolaan keuangan pura Beji Sangsit sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 tahun 2011 tentang pelaporan organisasi nirlaba?
- 1.5.4 Untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Pura Beji Sangsit sebagai objek pariwisata.
- 1.5.5 Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh *pengempon* pura Beji Sangsit dalam Implementasi Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Pura Beji Sangsit

1.6 MANFAAT HASIL PENELITIAN

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka terdapat dua manfaat yang bisa di dapat dari penelitian ini:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoretis ini diharapkan penelitian yang akan dilakukan ini dapat dijadikan suatu bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melangkapi kajian-kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya menyangkut masalah pengelolaan keuangan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan di bidang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana di perusahaan maupun di lembaga lainnya secara umum dan di sebuah pura secara khusus.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada seluruh masyarakat serta masyarakat mengetahui bagaimana *pengempon* pura Beji Sangsit melakukan pengelolaan alokasi dana Pura Beji Sangsit sebagai objek pariwisata.

c. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kemajuan akademisi serta mampu memberikan sumber referensi atau acuan untuk penelitian yang sejenis.